Si ITEM MANIS

SITUS INFORMASI TERPADU, AMAN dan EFISIEN: BEST PRACTICE PPID RSUD PROVINSI NTB



KATEGORI:

CUSTOMER SERVICE, MARKETING AND PUBLIC RELATION

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2025

Ringkasan

RSUD Provinsi NTB mengembangkan PPID Digital Terintegrasi sejak 2023 untuk mendukung keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008. Inovasi ini menggantikan sistem manual yang lambat, berisiko kehilangan data, dan kurang terdokumentasi. Melalui platform daring di situs resmi rumah sakit, masyarakat dapat mengakses laporan berkala, data statistik, indeks kepuasan, prestasi, hingga informasi layanan dengan cepat dan aman yang dikenal dengan Si ITEM MANIS (SITUS INFORMASI TERPADU, AMAN dan EFISIEN) sebagai Best Practice PPID RSUD Provinsi NTB. Implementasi ini memangkas waktu layanan informasi dari 5 hari menjadi maksimal 1 hari kerja, meningkatkan kepuasan publik, serta mengantarkan RSUD Provinsi NTB meraih peringkat pertama OPD se-NTB pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 dengan skor 99,40.

Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bertanggung jawab (good governance). UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan public merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Dengan adanya UU ini semua badan public mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi public secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sebagai salah satu institusi yang memberikan pelayanan public, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB merasa perlu menata secara sistematis tentang seluruh pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada di RSUD Provinsi NTB sehingga dapat memberikan pelayanan yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi dan dokumentasi ini juga dapat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi yang seharusnya diterima dan mempermudah petugas dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB memiliki beragam informasi sehingga perlu penataan dengan mengelompokkan informasi yang ada dalam beberapa kategori yaitu kategori informasi yang sifatnya terbuka dan informasi yang sifatnya informasi public yang dikecualikan. Adapun informasi public yang sifatnya terbuka yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi public yang wajib diumumk secara serta merta, informasi public yang wajib tersedia setiap saat. Oleh karena itu, sebagai upaya mengenal Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi di Lingkup RSUD Provinsi NTB maka di susun **Profil tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Provinsi NTB.**

Tujuan / Target Spesifik

Tujuan utama inovasi PPID Digital Terintegrasi RSUD Provinsi NTB adalah menyediakan layanan permintaan informasi publik yang dapat diakses secara mudah, cepat, dan responsif melalui platform digital resmi rumah sakit. Inovasi ini ditargetkan mampu memangkas waktu layanan dari rata-rata lima hari kerja menjadi maksimal satu hari kerja, sehingga memenuhi bahkan melampaui standar Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, program ini diarahkan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat, dengan target minimal 90 % berdasarkan hasil survei internal tahunan. Keamanan data publik serta kerahasiaan informasi pasien juga menjadi prioritas, dengan penerapan standar perlindungan data sesuai regulasi PPID dan KIP. Secara berkelanjutan, PPID digital ini diharapkan dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan, predikat terbaik dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik bagi OPD NTB, sekaligus menjadi model praktik baik bagi rumah sakit lain di Indonesia.



Gambar 1. Tampilan halaman awal Website PPID RSUD Provinsi NTB (link website : https://rsud.ntbprov.go.id/)



Gambar 2. Tampilan pilihan menu Informasi Publik di dalam Website resmi RSUD Provinsi NTB

Langkah-Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan inovasi **PPID Digital Terintegrasi RSUD Provinsi NTB** dirancang secara sistematis dengan tahapan terukur berlandaskan prinsip *transparency by design* dan *service excellence*, mulai dari perencanaan hingga evaluasi berkelanjutan. Setiap tahap dirancang untuk menjawab permasalahan yang ditemukan pada sistem manual sebelumnya, sekaligus memastikan implementasi sesuai standar Keterbukaan Informasi Publik dan keamanan data pasien.

a. Desain & Perencanaan

• Audit Proses Manual

Tim PPID melakukan audit menyeluruh terhadap alur permintaan informasi publik yang sebelumnya dilakukan secara manual. Ditemukan permasalahan utama seperti lamanya birokrasi (rata-rata 5 hari kerja untuk merespon), dokumentasi yang tersebar di berbagai unit sehingga sulit dikonsolidasi, serta ketiadaan integrasi sistem digital.

• Identifikasi Kebutuhan Sistem

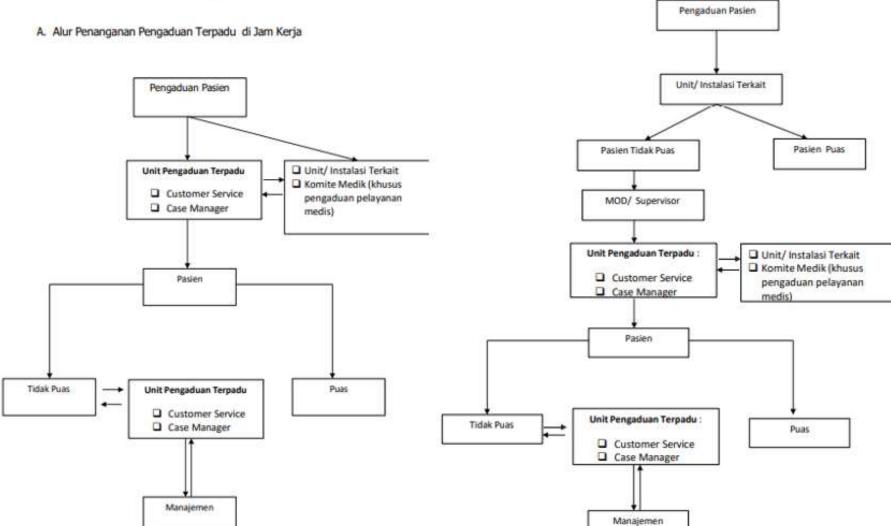
Hasil audit dibahas melalui **Focus Group Discussion (FGD)** yang melibatkan unsur PPID, unit Teknologi Informasi, manajemen mutu, dan unit hukum. Diskusi ini menghasilkan daftar kebutuhan sistem yang memuat fitur utama, standar keamanan data, serta tata kelola informasi sesuai regulasi UU KIP dan standar pelayanan rumah sakit

Tabel : Alur Pelayanan Informasi Publik Aktifitas Pemohon PPID Petugas Unit No 1 formasi Kerja pada SKPD Pemohon menyampaikan permintaan informasi yang tidak tersedia pada website RSU Provinsi NTB PPID meminta petugas informasi untuk memverifikasi informasi yang di minta pemohon, apakah Ya tersedia, jika tersedia maka petugas informasi akan melayani tapi jika tidak ada maka PPID Tidak akan menjawab ke pemohon bahwa informasi yang diminta tidak tersedia Petugas informasi mencatat permintaan informasi ke dalam daftar permohonan menghubungi unit kerja pada SKPD untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon Unit kerja memverifikasi informasi yang diminta oleh pemohon jika tidak ada didata base maka PPID meminta informasi ke unit yang lain yang menguasai informasi tersebut Unit kerja SKPD memberikan data yang diminta ke petugas informasi dan petugas informasi memberikan informasi melalui PPID dan mencatat pelayanan informasi yang diberikan Informasi diterima oleh pemohon ataupun ditolak

Gambar 3: Alur Pelayanan Informasi Publik

ALUR PELAYANAN PENGADUAN/KOMPLAIN PELANGGAN PUBLIK RSUD PROV.

NTB



B. Alur Penanganan Pengaduan Terpadu diLuar Jam Kerja

b. Pengembangan Sistem

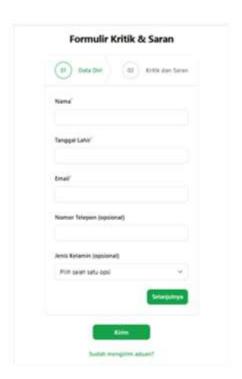
Pengembangan Modul Digital

Tim TI merancang dan membangun modul PPID di situs resmi RSUD Provinsi NTB, mencakup:

- 1. Form Permintaan Informasi Online yang dapat diakses 24/7.
- 2. Daftar Informasi Publik (DIP) yang memuat informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat.
- 3. Formulir Keluhan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan atau aduan terkait pelayanan.
- 4. Notifikasi Status Permintaan melalui email atau SMS agar pemohon dapat memantau progres permintaan.

Keamanan Data

Sistem dilengkapi teknologi enkripsi SSL/TLS dan otentikasi pengguna untuk memastikan kerahasiaan data publik dan informasi yang dilindungi, khususnya yang menyangkut privasi pasien



Gambar 4: Formulir Kritik dan Saran



Gambar 5: Formulir Permohonan Informasi



Gambar 6: Formulir Pengajuan Keberatan

c. Uji Coba & Pelatihan

• Simulasi Layanan Digital

Dilakukan uji coba internal dengan skenario nyata, mulai dari pengajuan permintaan informasi hingga penyampaian dokumen. Hal ini bertujuan menguji stabilitas sistem, memastikan kelancaran proses, dan mendeteksi bug atau kendala teknis.

Pelatihan Petugas

Petugas PPID, admin TI, dan perwakilan unit layanan terkait mendapatkan pelatihan intensif. Materi pelatihan meliputi penggunaan portal, prosedur penanganan permintaan, etika pelayanan publik, serta penanganan data rahasia.

d. Implementasi Penuh

• Go-Live Portal PPID Digital

Portal resmi PPID digital diluncurkan dan diintegrasikan penuh dengan layanan RSUD Provinsi NTB. Semua permintaan informasi publik dialihkan ke sistem ini untuk memastikan sentralisasi dan konsistensi data.

• Kampanye Sosialisasi

Peluncuran disertai dengan kampanye media internal dan eksternal, termasuk pemasangan banner di area rumah sakit, publikasi di media sosial resmi, penyebaran informasi melalui intranet, dan pengumuman melalui kanal berita RSUD NTB.

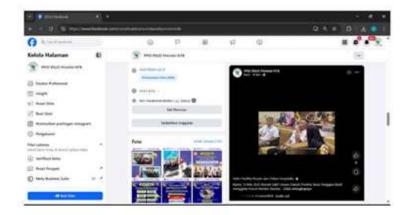
SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SAAT APEL PAGI DI RSUD PROVINSI NTB

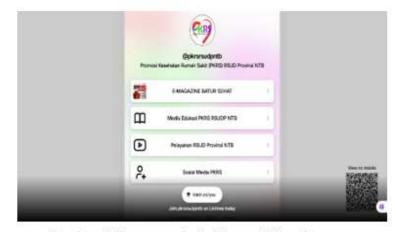
SOSIALISASI DAN EDUKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE RESMI RSUD PROVINSI NTB





Gambar 7: Sosialisasi dan Edukasi terkait PPID melalui Media Sosial





Gambar 8: Laman website Promosi Kesehatan

e. Monitoring & Evaluasi

Pemantauan Berkala

Dibuat **dashboard monitoring triwulanan** yang memuat jumlah permintaan informasi, rata-rata waktu penyelesaian, tingkat kepuasan pemohon, serta jenis informasi yang paling sering diminta.

• Survei & Audit Internal

Survei kepuasan pengguna dilakukan setiap triwulan untuk mengukur efektivitas layanan. Hasil survei digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Audit internal memastikan bahwa setiap prosedur berjalan sesuai SOP, termasuk verifikasi terhadap kepatuhan UU KIP.

• Perbaikan SOP

Jika ditemukan hambatan atau kegagalan penanganan permintaan, SOP diperbaiki untuk meminimalkan risiko berulang.

f. Penguatan Komitmen

• Penguatan Anggaran

RSUD Provinsi NTB menetapkan alokasi anggaran tahunan untuk pemeliharaan, pengembangan fitur baru, serta peningkatan kapasitas server dan keamanan siber PPID digital.

• Kolaborasi Eksternal

Menjalin kemitraan dengan **Komisi Informasi Provinsi NTB** untuk pendampingan teknis, evaluasi berkala, dan proses akreditasi PPID.



Gambar 9: Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Bersama Komisi Informasi

• Inovasi Berkelanjutan

Mengintegrasikan PPID digital dengan sistem manajemen rumah sakit lainnya, seperti SIMRS, sehingga data pelayanan, mutu, dan keselamatan pasien dapat diakses secara real-time.

Dengan tahapan yang terstruktur ini, PPID Digital Terintegrasi tidak hanya mempercepat layanan informasi publik, tetapi juga memperkuat citra RSUD Provinsi NTB sebagai rumah sakit rujukan yang mengutamakan mutu, keselamatan pasien, dan transparansi publik secara berkelanjutan.

Hasil & Dampak

Implementasi **PPID Digital Terintegrasi** di RSUD Provinsi NTB telah menghasilkan peningkatan nyata dalam aspek **mutu layanan, keselamatan pasien, dan transparansi publik**. Berikut hasil yang terukur dan relevan:

a. Peningkatan Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Implementasi PPID Digital Terintegrasi berhasil mentransformasi sistem manual menjadi layanan digital tercanggih. Ini membawa RSUD Provinsi NTB menuai penghargaan prestisius di level provinsi. Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, PPID RSUD NTB berhasil meraih peringkat pertama kategori OPD dengan nilai 99,40 <u>Lombok PostSuarantb</u>. Penghargaan tersebut bukan hanya menandakan eksistensi PPID sebagai pemenuhan regulasi, tetapi sebagai bentuk keunggulan implementasi yang konsisten dan berdampak nyata.

b. Efisiensi Waktu Layanan

Sebelum digitalisasi, rata-rata waktu layanan PPID mencapai **5 hari kerja**, yang menjadi salah satu kendala utama pelayanan publik. Dengan portal PPID digital, proses permintaan informasi kini terselesaikan dalam waktu **kurang dari 1 hari kerja** untuk mayoritas kasus memungkinkan respon cepat, proses yang lebih transparan, dan penurunan potensi keluhan dari publik secara signifikan.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik tahun 2024

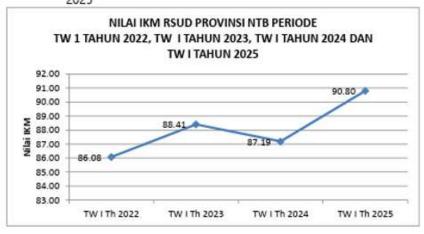
No	Jenis Informaci	Jumish Pengaknes	Cara Akses		Waktu Mendapatkan Informati		Pemberian Informati			Alassa Penolakan	
			Web/ Medson	Desk Layanan	0-15 menit	16-30 menit	> 30 menit	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
1	Alur Pelayanan (prosedur)	76	15	61	76	0	0	76	0	0	0
2	Mekanisme Rujukan	405	0	405	198	207	10	405	0	0	0
3	Entri Denda BPJS	501	0	501	501	0	0	501	0	0	0
4	Pendaftaran Bayi Baru lahir	441	0	441	441	0	0	441	0	0	0
5	Jadwal Pelayanan	62	25	37	62	0	0	62	0	0	0
6	Jadwal Operasi	26	0	26	26	0	0	26	0	0.	0
7	Tarif layanan	30	10	20	30	0	0	30	.0	0	0
8	Pengaduan	47	40	7	47	0	0	47	0	0	0
	Jumlah	1.588	90	1.498	1.381	207	10	1.585	0	0	0

Gambar 10: Tabel Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

c. Peningkatan Kepuasan Masyarakat

Survei internal menunjukkan bahwa **indeks kepuasan masyarakat meningkat menjadi** ±90 %, naik dari sekitar 86 % sebelum implementasi, mencerminkan persepsi positif terhadap layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Gambar 2 Tren Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat Periode TW I Tahun 2022, TW I Tahun 2023, TW I Tahun 2024 dan TW I Tahun 2025



Gambar 11: Grafik Presentasi Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun nya

d. Keamanan dan Akurasi Data

Layanan digital memungkinkan pengendalian data lebih baik dibanding sistem manual. Dengan mekanisme otentikasi dan enkripsi, data permintaan publik serta informasi sensitif pasien dijaga keamanannya. Selain itu, informasi yang disampaikan dijamin akurasinya karena berasal dari **Daftar Informasi Publik (DIP)** resmi yang selalu diperbarui melalui portal.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Pengaduan di RSUD Provinsi NTB tahun 2024

NO	BULAN	SARANA PENGADUAN										
		PENGADUAN LANGSUNG	MEDIA SOSIAL									
			WHATSAPP	NTB CARE	INSTAGRAM	FACEBOOK	GOOGLE REVIEW	Hello RSUD	KOTAK SARAN	SMS CENTER	SURAT	
1	Januari	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Februari	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	April	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Mei	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	
6	Juni	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
7	Juli	3	0	0	2	0	0	2	0	0	0	
8	Agustus	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	
9	September	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
10	Oktober	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	
11	November	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	
12	Desember	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gambar 12: Tabel rekapitulasi pengaduan di RSUD Provinsi NTB tahun 2024

Tabel 2.4 Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi Tahun 2024

Jumlah	Tanggapan	Jumlah	
Keberatan	Memperkuat	Membatalkan	Sengketa Informasi
0	-	-	0

Gambar 13: Table Daftar keberatan dan sengketa Informasi tahun 2024

REALISASI TINDAK LANJUT LAPORAN PPID RSUD PROVINSI NTB TAHUN 2024

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT (SUDAH/ BELUM)	DESKRIPSSI TINDAK LANJUT	DOKUMEN	KET.
I.	Sering terjadi mutasi pejabat sehingga menyebabkan anggota tim PPID berubah juga	Sudah	Pembaharuan SK Tim PPID RSUD Provinsi NTB setiap tahun	Terlampir	
2.	Pemahaman tim PPID dan civitas hospitalia terhadap keterbukaan informasi public dan penggunaan serta pemanfaatan media social secara baik dan benar masih belum optimal	Sudah	Sosialisasi dan edukasi civitas hospitalia melalui apel pagi dan sosial media Penguatan PPID oleh PPID Utama	Terlampir	
3.	RSUD Provinsi NTB belum menyediakan tenaga khusus yang bertugas mengelola PPID, dimana saat ini masih dikelola oleh Tim PPID yang terdiri dari beberapa pejabat struktural dan staf fungsional.	Sudah	- Pembaharuan SK Tim PPID RSUD Provinsi NTB setiap tahun	Terlampir	*

Gambar 14: Tabel realisasi tindak lanjut laporan PPID tahun 2024

e. Peningkatan Kepuasan Publik

Meskipun data survei kepuasan internal belum dipublikasikan resmi, pengakuan tertinggi di provinsi menjadi indikator kuat bahwa masyarakat merasakan manfaat nyata dari layanan PPID Digital. Tingginya skor (99,40) dan penerapan keterbukaan informasi yang konsisten mencerminkan persepsi positif dan kepercayaan publik yang meningkat terhadap RSUD NTB.

f. Dampak pada Mutu Layanan & Keselamatan Pasien

Keberadaan informasi publik yang jelas seperti alur layanan, hak dan kewajiban pasien, cakupan BPJS, hingga prosedur keselamatan klinis menciptakan iklim pelayanan yang lebih teredukasi dan berorientasi mutu. Direktur RSUD menyatakan bahwa papan informasi di IGD hingga ruang operasi membantu pasien dan keluarga memahami alur layanan, serta meminimalkan miskomunikasi terkait prosedur dan penanganan emergensi (sumber: Lombok Post). Hal ini memperkuat keselamatan pasien melalui edukasi dan harapan yang realistis.

g. Konsistensi dan Keberlanjutan Inovasi

Tidak hanya sekadar inovasi sementara, keberhasilan ini menunjukkan konsistensi komitmen RSUD NTB terhadap keterbukaan informasi. Platform digital terus ditingkatkan dengan integrasi data statistik, laporan berkala, dan mekanisme audit internal untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan skor tahun berikutnya.

h. Replikasi dan Teladan bagi Rumah Sakit Lain

Pengakuan eksternal ini tidak hanya menjadi predikat prestisius, tetapi juga menjadi teladan. RSUD NTB telah menjadi contoh best practice bagi rumah sakit lain dan lembaga OPD di NTB yang ingin mengejar pengelolaan PPID digital efektif dan transparan. Ini menciptakan efek domino positif dalam memperkuat tata kelola publik berbasis teknologi.

Prestasi yang telah dicapai oleh RSUD Provinsi NTB berkaitan dengan PPID:

1. Anugerah Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai Badan Publik OPD Informatif Peringkat 1 Tahun 2021

RSUD NTB Raih Peringkat Terbaik Keterbukaan Informasi Publik 2021





Foto: Ruman Sakit Umum Daerah (KSUD) NTB kempali berhasil meraih peringkat terbalik Keterbukaan Informasi Rubik Reskat Provinsi NTB tahun 2021 dengan nini yang kampur sempunya (Nebbali Murr)

2. Anugerah Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai Badan Publik OPD Informatif Peringkat 1 Tahun 2022

RSUD NTB pertahankan peringkat pertama OPD informatif

Selasa, 20 Desember 2022 14:43 WIB Waktu baca 3 menit



Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. H. Lalu Herman Mahaputra saat menerima penghargaan dari Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB. ANTARA/Nur Imansyah.

3. Badan Publik Provinsi NTB yang informative dengan nilai terbaik dari TribunLombok.com, 18 Februari 2023

RSUD Provinsi NTB Dapat Penghargaan: Sukses Pertahankan Kualifikasi Informatif



4. Anugerah Keterbukaan informasi publik Provinsi NTB sebagai badan publik OPD "Informatif", 25 Oktober 2024.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, PPID RSUD Provinsi NTB Kembali Raih Peringkat Pertama



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



Jis Prahu Rangkasen Dasse Cermen Telp./Fax (0370) 7502424/7502992 Maturum Kode Fon: \$1237 Email resublineSpece go. at. Website mut obspecy go. d.

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 06.3.5 / 90 /RSUDP/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAR SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengumpulan, pendokumentasi, penyimpanan, penseliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu ditengkan Pejabat Pengelolian Informasi dan Dokumentasi
 - b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tubus 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejahat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nuss Tenggara Barat ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 - c. Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) tersebut, perlu mecetapkan Keputusan Direktur tentang Proetapan Prjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahus 2009 tentang Kesebatan:
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Taban 2020 testing Provinsi Nasa Tenggara
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tokus 2023 tentang Rumah Saker.
- 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakin
- 6. Peranaran Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksuman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketestukasa Informasi
- 7. Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- S. Persturan Gubernar Nuisa Tenggara Burat Nomer: 37 Tahun 2023 Terrang Perubahan Atas Peraturan Gubersur Notice : 35 Tahun 2023 Tentang Pembeundan, Surunan, Organismi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kena Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nasa Tenggara Barat;
- 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor #2 Tahun 2023 terratu Tata Kelola Kumah Sakit Umum Darrah Previous Ness Tenggara flurat
- 10 Kepatusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 37 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pols Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Durah (PPK- BLUD) pada RSUD Provinsi NTB.

MEMUTUSKAN

Mesetspkan KESATU

Menetapkan Pejahat Pengelola Informani dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Uroum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dengan susunan keunggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kepatusaan

- Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan serta mengamankan.
- b. Memberikan pelayanan informasi sessai dengan aturan yang berlaku; Melakukan verivikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan:
- Melakukan pemunahbiran informasi dan dokumentani;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi ustuk diakses oleh masyarakat;
- g. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala.

KETIGA Segala bisya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibehankan pada DPA/RBA Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nuna

Tenggara Barat Tahun Anggaran 202€ KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku urjak tanggal ditetapkan dan apabila

dikenzudian hari terdapat kekeliruan dalam beputusan ini akan diadakan perhakan sebagaimana mestinya.

> Disetapkan di Maturam. utelanged a unitarie



Tembusan dinampaikan kepada :

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- Maring-maring yang bersangkutan.
- 1. Amip



PEDOMAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Jin Prabu Rangkasari Dasan Cennen Mataram Telepon /Fax: (0370) 7502424/ (0370) 7502992 Kode Pos: 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website rsud ntbprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln Prabu Rangkasari, Dasan Cermen, Kota Mataram, NTB 83232

Telepon: (0370) 7502424, Faximile: (0370) 7502992



LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Si ITEM MANIS

SITUS INFORMASI TERPADU, AMAN dan EFISIEN:

BEST PRACTICE PPID RSUD PROVINSI NTB

Penulis : dr. Maylia Sulasiyani Hazar

Pangkat/ Gol : Administrator Kesehatan Ahli Pertama (IIIa/ IX) Tempat Tugas : Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Mataram, 16 Agustus 2025,

Disahkan Oleh,

dr.H. Latu Meroran Manaputra, M.Kes, MH NIP. 196811 102001121003

dr. Maylia Sulasiyani Hazar NIP: 19910510 202421 2 051

Penulis